

Pemberdayaan Purna Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Desa

Eva Ambarwati¹, Ekapti Wahjuni DJ^{2*}, Niken Lestari³

^{*12} Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

³ Prodi Ilmu Komunikasi, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

*ekapti.wahjuni@yahoo.com

Submisi: April 2019; Penerimaan: Desember 2019

Abstrak

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu alternatif cara bekerja, yang oleh sebagian masyarakat Indonesia menjadi pilihan, dengan merantau atau bekerja di luar negeri masyarakat kita beranggapan akan mendapat remitan yang dapat digunakan sebagai model membuka usaha, atau memenuhi kebutuhan hidup, setelah TKI Kembali ke Indonesia atau menjadi purna, terkadang banyak persoalan yang muncul, misalnya terkait kebingungan untuk melanjutkan kegiatan ekonomi atau memulai usaha, habisnya modal dikarenakan perilaku konsumtif dan gaya hidup yang tidak baik, kondisi tersebut pada akhirnya membuat pemerintah desa sebagai perwakilan Negara, merasa gundah, mengingat desa banyak terbantu dari aktifitas Tenaga Kerja Indonesia yang diluar negeri, sehingga masyarakatnya bisa lebih mandiri, namun demikian tidak semua TKI yang kembali ke tanah air mampu *survive* sehingga diperlukan upaya sistematis dari pemerintah, untuk memberdayakan masyarakat khususnya TKI Purna. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode diskriptif kualitatif, dimana sumber data nya terdiri dari, wawancara, observasi serta dokumentasi, untuk pemilihan informan melalui teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan informan memahami materi yang akan di teliti. Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai inisiator untuk memperdulikan Tenaga Kerja Indonesia Purna, sebagai motivator agar Tenaga Kerja Indonesia Purna bisa hidup mandiri berwirausaha di desa, dan *actuating* sebagai penggerak dan pemberi arahan. Upaya yang telah Pemerintah Desa lakukan dalam hal ini yaitu, melakukan pendekatan kepada Tenaga Kerja Indonesia Purna, mengumpulkan dan membentuk kelompok usaha sesuai bakat yang dimiliki, mengadakan pembinaan dan pelatihan usaha, melakukan pendampingan berkelanjutan dan membantu pemasaran. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang diberdayakan pada tahun 2014 ada sejumlah kurang lebih 250 orang. Kelompok usaha yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik dan berkembang yaitu kelompok usaha peternak kambing, peternak ikan lele, dan peternak sapi. Dalam kelompok tersebut ada sekitar 160 Tenaga Kerja Indonesia Purna yang sudah punya usaha sendiri.

Kata kunci: TKI Purna; Pemberdayaan; Pemerintah Desa

Abstrak

Indonesian migrant workers (TKI) is one alternative to work, by some Indonesia, be an option, with wander or working overseas our society will be remittance assume that can be used as a model open a business, or fulfill their needs, After migrant workers returned to Indonesia or become purna, sometimes many problems that appear, for example, related confusion to continue economic activities or establishing a new business, because endless capital behavior consumptive and lifestyle that is not good, This is ultimately the village as state representatives feel, you attack village of helped much activity of Indonesian workers extraneous, land so that people can, more independent, However not all of the migrant workers heading back to their homeland capable of survive it with a systematic approach that

they need from the government, to empower local people especially former migrant workers. The research was conducted using methods diskriptif, qualitative where his, consisting of data sources , interview observation and, documentation for election informants through purposive techniques of sampling in consideration of informants understand material will be minutely. The role of the government former village in empowering migrant workers in the village in ponorogo karangpatihan balong district. As the initiator of to to hand over the heedless and leave behind suppose to receive migrant workers , as motivator so that they can live on their own made by in the village , and as actuating the as the driving force of and providers of the direction of the counsellor for. Efforts have been the village administration do in this, becoming close to former, migrant workers collect and formed the talents they have, the business suit makes guidance and training, business with assistance sustainable and helps marketing. Former, migrant workers who empowered in 2014 some more or less 250. one Business group in a structured and well organized and developing the business group, goat rancher farmers, catfishes, and breeder. cattle The group former around 160, migrant workers who already own their own businesses.

Keyword: Former migrant workers; empowerment; the village administration

Pendahuluan

Pemerintahan desa adalah salah satu model dari sistem pemerintahan tertua yang ada di Indonesia, keberadaannya dari dahulu sudah bisa dijumpai dalam struktur masyarakat Indonesia, walaupun penamaan dan penyebutanya berbeda di setiap wilayah, misalkan di pulau jawa dikenal dnegan istilah desa, kemudian di bali lebih *familiar* dengan sebutan banjar, di aceh biasa disebut *gampong* dan lain sebagainya.(Arya Hadi Dharmawan, 2006)

Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang paling bawah, dalam hirarki sistem pemerintahan di Indonesia, keberadaannya sangat penting, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung menghadapi persoalan – persolan yang muncul di sekitar komunitas masyarakat, mulai dari persoalan sosial, budaya, religius, hingga persoalan klasik seperti ekonomi dan kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa : *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* (Awang. 2010)

Desa sebenarnya memiliki ketahanan yang baik, dalam rangka mengatasi persoalan – persoalan yang muncul sistem pemerintahan, struktur sosial masyarakat, ataupun dengan kultur kekeluargaan serta gotong royong menjadikan desa lebih kuat, namun demikian seiring dengan perkembangan zaman, di era globalisasi, membuat keberadaan masyarakat semakin rapuh digerus perubahan, sehingga banyak sekali aspek kehidupan yang kemudian berubah drastis, sehingga tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, selain itu desa sangat lekat sekali dengan

aktifitas agraris sebagai penopang kehidupannya. Desa secara umum disebut sebagai tempat tinggal menetap dari suatu kelompok kecil serta identik dengan pertanian (Rahardjo. 2010).

Perubahan sosial kultural dalam masyarakat tidak terfokus dalam kehidupan masyarakat kota, akan tetapi masyarakat desa juga telah banyak mengalami perubahan maupun perkembangan sebagai akibat dari introduksi teknologi, komunikasi, transportasi dalam tatanan kehidupan masyarakat luas (Rauf Hatu, 2011).

Perubahan kultural masyarakat khususnya masyarakat desa lebih banyak terfokus pada segi-segi non material, sebagai akibat dari penemuan baru atau modernisasi. modernisasi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi dinamika kehidupannya, serta merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial budaya masyarakat yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan yang bersifat positif maupun negatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transformasi masyarakat tradisional ke dalam masyarakat pra-modern.(Rauf Hatu, 2011)

Berbicara terkait modernisasi, di desa, seringkali kita melihat terjadinya perubahan yang sangat fundamental, yang sebenarnya harus disadar, sebagai contoh misalnya masyarakat desa mulai *enggan* bertani, dan memilih menjual lahannya dan menjadi masyarakat konsumtif, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian, karena memilih mengikuti perubahan itu sendiri. Banyak juga dialami ketika mereka meninggalkan pekerjaan utama nya sebagai petani, kemudian mereka *berbondong – bondong* mencari pekerjaan di kota besar, alasan klasik yang selalu diungkapkan adalah pergi merantau ke kota besar supaya dapat merubah nasib.

Modernitas (kehidupan yang lebih moderen) menunjukkan sejumlah fenomena baru dalam masyarakat moderen. Di bidang ekonomi yang menjadi sentral keseluruhan sistem sosial, terlihat fenomena sebagai berikut: 1). Pertumbuhan ekonomi sangat cepat. 2). Terjadinya pergeseran dari produksi agraris ke industri sebagai inti sektor ekonomi, 3). Konsentrasi produksi ekonomi di kota dan kawasan urban, 4). Penggunaan sumber daya tak bernyawa sebagai pengganti tenaga kerja manusia dan hewan. Penyebaran temuan teknologi ke seluruh aspek kehidupan sosial, 6). Terbukanya pasar tenaga kerja berkompetensi bebas dan sedikitnya pengangguran, 7). Terkonsentrasinya tenaga kerja di pabrik dan perusahaan raksasa, 8). Pentingnya peran pengusaha, manager, atau "kapten industri" dalam pengendalian produksi (Elly Rosana, 2011)

Pola urbanisasi dan migrasi atau perpindahan masyarakat dengan usia produktif ke kota besar, sebenarnya banyak terjadi di wilayah pedesaan, sama halnya yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, salah satu wilayah yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur tercatat dalam beberapa kurun waktu terakhir, Pada 2011 lalu, jumlah TKI yang berangkat mencapai 3.233 orang. Rinciannya, 392 laki - laki dan 2.841 TKW. Hingga Juni lalu, jumlah TKI yang berangkat mencapai 2.138 orang, yakni 424 laki - laki dan 1.714 wanita. Jumlah tersebut belum termasuk TKI ilegal. Dari jumlah ini, sekitar 80% bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Sisanya bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja di perkebunan sawit dan kuli bangunan. Sangat sedikit TKI yang menduduki pekerjaan profesional atau level manajerial. Dari ribuan pemburu devisa ini, dana yang dikirim untuk keluarganya di Ponorogo tidak bisa dibilang kecil. Tiap bulan, remitansi dari para Tenaga Kerja Indonesia selalu berada di angka belasan miliar rupiah. Angka remitansi ini akan melonjak drastis menjelang Lebaran. Dalam setahun, jumlah remitansi TKI ini bisa mencapai dua kali lipat melebihi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang pada 2011 lalu hanya sebesar Rp52 miliar. (Wafirotin, 2013)

Potensi menjanjikan sebagai buruh migran atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia), tidak selamanya berbuah manis, karena ada hal yang perlu dipikirkan oleh TKI pasca atau setelah mereka tidak bekerja, hal apa yang akan mereka kerjakan, selain itu tidak semua TKI yang pulang ke Tanah Air membawa hasil, ada juga yang gagal karena manajemen keuangan yang buruk dan sembarangan.

Permasalahan penting para Tenaga Kerja Indonesiayang jarang terungkap di antaranya adalah permasalahan pengelolaan keuangan yang diperankan oleh keluarga mereka di kampung halaman. Besarnya pendapatan yang diterima Tenaga Kerja Indonesia seringkali menjadi tumpuan harapan maupun sasaran bagi keluarga besar mereka. Tidak hanya suami/istri, anak, ayah/ibu kandung, ayah/ibu mertua tetapi juga saudara-saudara terdekat para Tenaga Kerja Indonesia. Sangat memprihatinkan jika banyak Tenaga Kerja Indonesiayang pulang ke kampung halaman mendapati uang kirimannya telah habis dipakai memenuhi kebutuhan keluarga maupun sanak saudaranya. Keluarga TKI yang menerima remitansi membelanjakannya untuk konsumsi barang-barang seperti handphone, sepeda motor, mobil, televisi, kulkas serta perabotan rumah lainnya. Mereka yang bekerja di luar negeri menjadi penopang utama bagi perekonomian keluarga, bahkan tidak jarang keluarga yang ditinggalkan hanya berfoya-foya menggunakan hasil jerih payah para TKI. Tidak sedikit para TKI yang pulang dengan kondisi uang kirimannya

telah dihabiskan oleh keluarganya, sehingga mereka terpaksa pergi menjadi TKI lagi atau bahkan menjadi pengangguran kembali. (Hamidah, 2016)

Kondisi pasca menjadi TKI jika dibiarkan begitu saja, dan tidak dipersiapkan secara baik maka, para purna TKI akan kembali pada kondisi semula, yakni penuh dengan kondisi keterbatasan, salah satu wilayah di Kabupaten Ponorogo yang terkenal sebagai lumbung TKI berinisiatif untuk melakukan berbagai program pemberdayaan yang dikhususkan untuk para eks TKI, sehingga mereka bisa beradaptasi dan memiliki ketrampilan dan usaha yang dapat dijadikan sebagai penopang kehidupan.

Pemerintah Desa kemudian membentuk kelompok usaha dengan anggota Tenaga Kerja Indonesia Purna yang telah mendapatkan pembinaan melalui Pusat Latihan Kerja (PLK) sebagai program pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, jumlahnya ada sekitar 160 jiwa. TKI Purwa kemudian dibina sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, melalui lembaga berikut: Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Masyarakat (Pokmas), peternak ikan, peternak sapi, peternak ayam, ketrampilan, pembuatan makanan olahan. Kegiatan – kegiatan pemberdayaan tersebut nantinya diharapkan dapat menciptakan usaha atau lapangan pekerjaan bagi para TKI Purna, sebagai aktifitas yang menopang kehidupannya.

Program tersebut sangat menarik untuk dikaji, terlebih lagi ada peran serta pemerintah dalam proses pelaksanaannya, bagaimana sesungguhnya peranan pemerintah desa dalam memberdayakan TKI Purna, sehingga bisa mandiri, berdaya dan kembali memiliki ketahanan dalam menjalani kehidupan sehari – hari.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa, merupakan salah satu upaya pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintahan, yakni Pemberdayaan dalam arti *empowering*, artinya pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi atau menentukan masa depan. Pemberdayaan dalam arti *enabling*, artinya proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. Fungsi pemberdayaan ini semakin mencuat dengan semakin maraknya debat tentang HAM. Upaya membentuk pemerintah desa yang mandiri merupakan konsep pemberdayaan masyarakat desa. Artinya, apabila masyarakat desa berdaya maka mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri (Ndharma, 2011).

Metode Penelitian

Denzin dan Licoln “Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Noor. 2011). Kajian ini peneliti berusaha mendiskripsikan bagaimana peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, dimana pengambilan didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai pengetahuan atau pemahaman, terkait dengan obyek yang diteliti, Informan dalam penelitian ini yaitu: Pemerintah Desa Karangpatihan sebanyak 3 orang, dan Tenaga Kerja Indonesia Purna yang sekaligus juga sebagai ketua dan anggota di kelompok usaha sebanyak 6 orang.

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1	Eko Mulyadi	Laki - Laki	Kepala Desa	Ketua PLK
2	Samuji	Laki - Laki	Jogoboyo II	Seksi Pendidikan & Pelatihan
3	Paimin	Laki - Laki	Kebayan IV	Seksi Penelitian & Pengembangan
4	Sugeng	Laki - Laki	Tani	TKI Purna & Ketua Kelompok
5	Purwanto	Laki - Laki	Wiraswasta	TKI Purna & Pendamping Kelompok
6	Teguh	Laki - Laki	Wiraswasta	TKI Purna & Pendamping KUBE
7	Mujianto	Laki - Laki	Tani	TKI Purna & Anggota KUBE
8	Suyitno	Laki - Laki	Tani	TKI Purna & Ketua Kelompok
9	Sugito	Laki - Laki	Tani	TKI Purna & Pendamping Kelompok

Sumber: diolah dari hasil wawancara

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas : 1). sumber data primer berupa sumber data yang diperoleh dari observasi dan proses wawancara, 2). Sumber data dekunder, yakni sumberdata yang diperoleh di lapangan seperti, buku, dokumen, hasil penelitian dan lain sebagainya.

Teknik dalam pengumpulan data, dilakukan melalui beberapa teknik, seperti: observasi, melalui teknik ini peneliti coba untuk turun ke lapangan dan melakukan pengamatan terhadap obyek yang akan di teliti, dalam kurun waktu tertentu, selain itu ada juga teknik wawancara, yakni peneliti menemui informan, kemudian membuat draf Tanya – jawab atau wawancara dan melakukan diskusi, terkait hal penting yang menjadi kajian dalam penelitian ini, untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara, peneliti juga melakukan teknik dokumentasi, yaitu

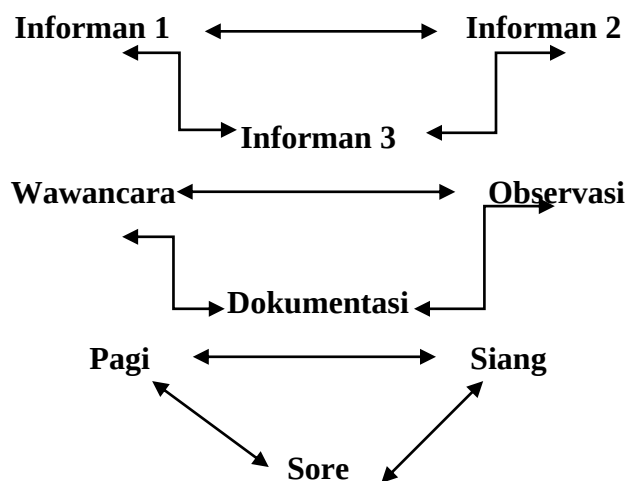
dnegan mengumpulkan dokumen, hasil – hasil penelitian, serta foto – foto hasil kegiatan untuk kelengkapan data yang dibutuhkan.

Setelah peneliti menentukan metode, informan, dan sumber data, maka peneliti kemudian melakukan tahapan analisis data, tahapan tersebut terdiri menjadi 3 tahap, yaitu: 1). Reduksi, 2). Penyajian data, 3). Penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Tahapan tersebut merupakan rangkaian proses yang berurutan, untuk mendapatkan data yang baik dan sesuai dnegan kaidah ilmiah.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data dan untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan : sumber, metode, penyelidikan dan teori. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang artinya membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal tersebut dapat didapat oleh peneliti dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang lain didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan (Sugiyono, 2010)

Gambar 1 Skema Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data



(Sumber : Bachri, 2010)

Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa

a) Upaya Pemerintah Desa

Kalau peranan Pemerintah Desa yang pertama sebagai inisiator. Kita yang menginisiasi dan kita yang membidangi pertama kalinya. Kita memang ingin sekali bahwa Tenaga Kerja Indonesia Purna itu dilatih. Awalnya yang pertama kita kumpulkan dan kerjasama dengan Buruh Migran Indonesia Purna. Jadi Pemerintah Desa sebagai inisiator awal, kita menginisiasi Tenaga Kerja Indonesia Purna. Alumni Tenaga Kerja Indonesia kita perdulikan. Tahap pertama yang kita lakukan yaitu mengumpulkan sekitar hampir 200 alumni Tenaga Kerja Indonesia dari luar negeri bekerja sama dengan salah satu organisasi Buruh Migran Indonesia Purna kita kumpulkan. Pertama kita motivasi dan lain-lain untuk bisa hidup mandiri dan setelah itu kita Pemerintah Desa membentuk berbagai kelompok seperti kelompok-kelompok masyarakat, kelompok usaha bersama, kelompok peternak, dan lain-lain. Mereka, kita masukkan dalam kelompok itu dan dibina sesuai kemampuan masing-masing seperti pada peternakan ayam, kemudian ada juga peternakan sapi, ada dipeternakan lele dan juga berbagai kegiatan lain.” (wawancara dengan Eko Mulyadi, 24 Mei 2016)

Kalau peranan dari kita Pemerintah Desa, kita menyarankan Mereka untuk membuat catering dan lain-lain, untuk menambah pemasukan Mereka. Terkadang kita juga repot juga karena antara Kita dan Mereka lebih kaya Mereka karena Mereka punya modal dari luar negeri. Kita Cuma bisa menyarankan dan mengarahkan supaya mereka itu tidak selalu terbang dan terbang lagi untuk mencari rejeki di negeri orang tetapi bagaimana Mereka bisa menetap di Karangpatihan itu dan bisa hidup mandiri dengan usaha-usaha yang telah Mereka geluti di desa ini.” (wawancara dengan Sumaji, 25 Mei 2016)

Peranannya karena orang-orang dari luar negeri sudah pintar, maka mereka mendapat bimbingan dari UGM. Jadi Pemerintah Desa juga aktif dan selalu memberi dorongan agar bagaimana kalau sudah kembali ke desa itu hasil yang sudah didapat di sana itu bisa dicanangkan termasuk di sini yang pulang dari Malaysia membuat lidi yang berada di dung Maron yang mau dikembangkan. Dan itu juga hasil dari Malaysia. Bagi yang sudah kembali, keinginan dari Pemerintah Desa yaitu dapat memanfaatkan ilmunya di desa. Jadi Kita selalu aktif, memberi motivasi dan dorongan. Ya mungkin seperti itu. Ya termasuk juga disuruh membantu kegiatan batik, itu juga banyak mantan-mantan Tenaga Kerja Indonesia dari luar negeri.” (wawancara dengan Paimin, 25 Mei 2016)

Kalau peran Pemerintah Desa itu untuk Tenaga Kerja Indonesia itu sudah ada. suatu contoh itu dari anggota kelompok Kami semua Tenaga Kerja Indonesia Purna. Sedangkan untuk upayanya Pemerintah Desa memotivasi dan juga memberikan semangat kepada kelompok anggota. dan juga memberikan semacam pelatihan. Misalnya kelompok Kami diikut sertakan pelatihan tersebut secara perwakilan.” (wawancara dengan Sugeng, 24 Mei 2016)

“Ya jelas sudah, Pemerintah sangat berperan.Selama ini juga upaya Pemerinatah membantu mencari modal awal.Jadi awalnya dari desa.Dan selanjutnya diserahkan ke kelompoknya supaya untuk bisa dikembangkan begitu saja.” (wawancara dengan Suyitno, 24 Mei 2016)

Kalau Pemerintah Desa itu sudah jelas, karena program ini yang mencari pemerintah. Jadi Pemerintah Desa terutama, termasuk saya ini bimbingannya Pemerintah Desa.Jadi Saya tetap di bawah naungan Pemerintah Desa.Jadi pemerintah itu menegaskan masyarakatnya bagaimana supaya Mereka itu bisa mandiri, bisa melakukan kegiatan tanpa mengharapkan bantuan dari luar.Jadi perannya pemerintah ya yang mencari program dan mencari kerjasama itu Pemerintah Desa.” (wawancara dengan Teguh, 25 Mei 2016)

“Pemerintah Desa itu mencari dana untuk mengembangkankelompok ini. Pemerintah Desa pengen pemeratakan terutaman anggota ini yang kurang mampu.Jadi, kalau bisa Mereka yang kurang mampu mendapat program bantuan.Terutama pada kelompok ini.” (wawancara dengan Mujiyanto, 25 Mei 2016)

“Yang pertama Kita diberi wawasan, yang kedua Kita diberi sumbangan dari dinas terkait tentang peternakan ikan, seperti halnya diberi modal. Sampai pada penjualan pun dari kelompok itu ada pembeli, jadi setiap kelompok itu ada satu pengepul pembelinya. Jadi Kita juga dimudahkan dengan adanya satu pembeli.” (wawancara dengan Purwanto, 24 Mei 2016)

Kalau menurut Saya desa tentang pemberdayaan kelompok ya sangat mendukung sekali.Bentuknya mungkin selama ini seperti bantuan sapi.Seperti program pemerintah tentang bantuan sapi itu. Juga ada proses membuat pakan. Pemerintah Desa mengikuti dari awal sampai akhir.” (wawancara dengan Sugito, 24 Mei 2016)

Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di desa Karangpatihan yaitu pertama sebagai inisiator artinya Pemerintah Desa yang menginisiasi atau yang mempunyai ide dan gagasan, kedua sebagai motivator artinya Pemerintah Desa selalu memberikan dorongan dan semangat untuk berkarya, ketiga sebagai actuating, artinya Pemerintah Desa memberikan arahan atau saran supaya Tenaga Kerja Indonesia Purna bisa berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang telah Pemerintah Desa lakukan yaitu dengan mengumpulkan Tenaga Kerja Indonesia Purna, selanjutnya di bentuk kelompok usaha berdasarkan minat dan bakat, kemudian dibina dan diberi pelatihan serta Pemerintah Desa selalu melakukan pendampingan.

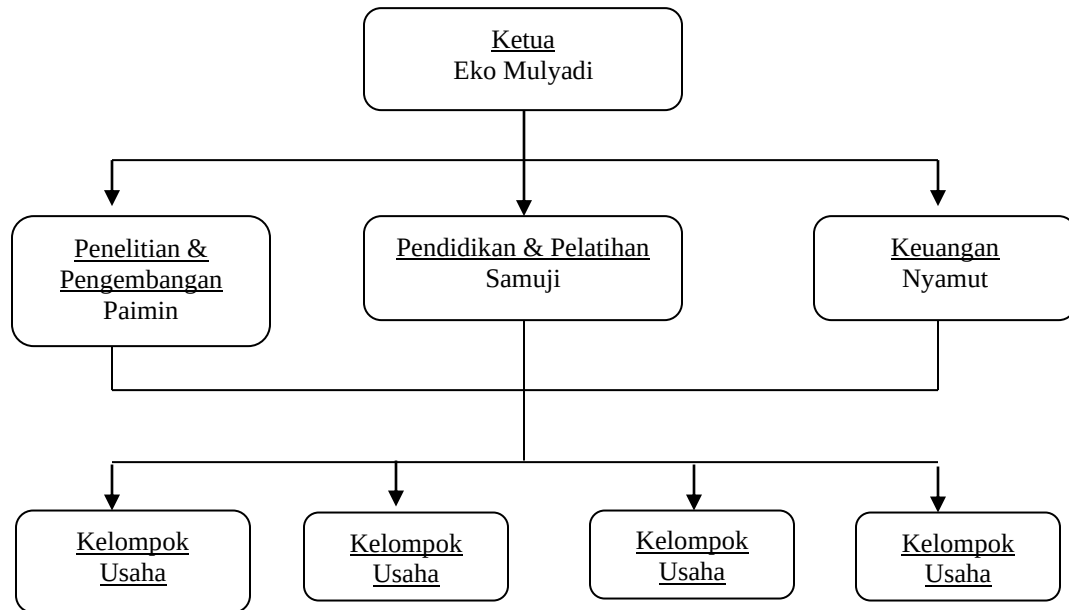
b) Jenis dari Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan untuk Tenaga Kerja Indonesia Purna ada Kelompok masyarakat, kelompok usaha bersama dibidang peternak kambing, ada peternak ikan, peternak sapi. Dan ada juga pemberdayaan lain seperti kue atau produksi makanan olahan. Jadi mereka kita ajari membuat catering dan lain-lain, dan dalam pemberdayaan ini ibu-ibunya ada dalam kelompok mandiri wanita, juga ada kerajinan handy craf, tapi yang terorganisir yaitu bidangusaha peternakan seperti ikan, kambing, dan sapi. Itu sudah terorganiser secara baik dalam sebuah kelompok usaha yang ada mereka-mereka ini Kita berdayakan melalui tahap pelatihan, pendampingan, pembantuan promosi pemasaran, membantu dengan kebijakan. Misal ketika memberdayakan tentang makanan olahan, Kita membuat peraturan desa bahwa seluruh masyarakat desa yang punya hajat harus menggunakan catering dalam desa. Seperti juga, ketika Kita menyambut tamu dari kabupaten harus menggunakan menu dengan dasar lele sebagai identitas kita kampung lele, Kita juga menghimbau toko atau warung tidak menerima sale telur dari luar desa tapi menggunakan telur produksi dalam desa. Kambing dalam kelompok tadi tidak boleh dijual kepada pedagang luar desa sehingga tumbuh pedagang desa dan catering dalam desa.” (wawancara dengan Eko Mulyadi, 24 Mei 2016)

Mengajak Mereka usaha, termasuk usaha lele. Sudah Saya sampaikan kalau pemberdayaan ke mereka itu sulitnya kalau untuk modal justru kaya Mereka daripada Kita. Kita lebih ajak Mereka untuk mengurus tunagrahita dengan pola pikir Mereka karena yang jelas Mereka punya pengalaman-pengalaman. Justru Dia Kita rangkul juga untuk pemberdayaan tunagrahita atau orang miskin. Termasuk juga yang disebelah ini (rumah harapan), Kita libatkan Mas Ikhsan waktu itu Dia dari Taiwan, juga Kita jadikan kader untuk pendampingan Mereka membuat batik. Kita libatkan seperti itu. Istilahnya bukan memberdayakan untuk diri Mereka sendiri tetapi Kita ajak dan Kita rangkul untuk memberdayakan Mereka yang tunagrahita. Yang itu nantinya kegiatan tersebut endingnya juga kita yang merasakan. (wawancara dengan Sumaji, 25 Mei 2016)

“Ya termasuk secara ketrampilan, diprogramkan supaya ada yang peternak lele, ada yang hubungannya dengan pertanian, hubungannya dengan ketrampilan yaitu membuat lidi, termasuk juga yang perempuan membuat catering atau makanan olahan seperti kue-kue. Itu bagi yang putri membuat makanan olahan, dan bagi yang pria peternakan yang paling utama. Disini setiap rumah di haruskan mempunyai kambing. Kalau tidak punya itu disuruh untuk gaduh milih tetangga. Jadi kegiatannya adalah yang harus bisa langsung dikerjakan.” (wawancara dengan Paimin, 25 Mei 2016)

Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Latihan Kerja “Karang Patihan Bnagkit”



Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Jenis pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna di desa Karangpatihan dikelompokkan berdasarkan usaha yang dimiliki. Usaha yang ada di Desa Karangpatihan di antaranya di bidang peternakan, bidang ketrampilan, dan juga makanan olahan. Jenis pemberdayaan kelompok usaha bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna yang sudah terorganisir secara baik yaitu usaha bidang ternak kambing, ternak sapi, dan ternak ikan lele. Mereka diberdayakan melalui tahap pelatihan beternak, pendampingan berkelanjutan, membantu pemasaran, dan melalui kebijakan-kebijakan. Misalnya kebijakan yang dibuat yaitu bahwa tidak diperbolehkan menjual hasil ternak Mereka kepada pedagang ternak luar desa Karangatihan.

c) Faktor pendorong dan Penghambat upaya Pemerintah desa dalam memberdayakan TKI Purna

Faktor pendorong pemberdayaan ini salah satunya adalah yang pasti bentuk kepedulian bersama. Yang kedua adalah banyaknya warga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri ini membuat Kita terdorong untuk bagaimana kita berfikir ketika Mereka sudah pulang itu Mereka sudah memiliki usaha sehingga uang itu tidak menjadi konsumtif. Jadi uang tidak konsumtif untuk membangun rumah, membeli kendaraan, tetapi untuk berwiraswasta. Faktor penghambat tentu salah satunya yaitu modal. Jadi

tentu kita berfikir bahwa hambatan setiap kegiatan itu pada logistik, tapi tentu kita tidak menyerah karena faktanya alumni-alumni Tenaga Kerja Indonesia minimal Mereka juga punya uang, karena Mereka pulang dari Luar Negeri.” (wawancara dengan Eko Mulyadi, 24 Mei 2016)

“Faktor pendorongnya yang pasti agar Mereka tidak selalu keluar negeri. Jadi Kita itu biar berwirausaha di desanya. Karena orang keluar negeri itu juga akhirnya ada batasan umur, ndak bisa Merek itu keluar negeri terus. Jadi otomatis Mereka harus berusaha sendiri di rumah jadi wirausaha, mungkin bisa ternak atau bertani. Pemerintah Desa Karangpatihan menyarankan seperti itu. Untuk faktor penghambat yaitu masalah pemahaman dan mikirnya. pola pikir kita itu beda-beda. Sulitnya kadang orang itu diajak baik itu tidak mau tapi kadang kalau ditipu atau diajak bohong justru mau. Itu tidak hanya kepada orang yang pola pikirnya rendah tapi ternyata banyak terjadi orang-orang yang aslinya pintar tapi dibohongi masih bisa dan itu banyak terjadi.” (wawancara dengan Sumaji, 25 Mei 2016)

“Faktornya banyak sekali, kan di sini ini dikenal 5 tahun yang lalu terkenal dengan kampung idiot, tapi faktornya itu bagaimana dapat mengubah hal itu menjadi lebih baik..Kedua, tahun-tahun yang lalu karena disini tempatnya pinggiran dan selalu diejek, istilahnya waktu pilihan lurah saja “hanya makan tiwu, orang gunung dan pinggiran”, ejekan itu menjadi faktor utama, faktor ketidakmungkin nyata adanya. Faktor selanjutnya yaitu karena di sini banyak tunagrahita, itukan untuk menghidupi paling tidak bisa mengasih kerjaan kepada Mereka. Jadi, kalau orang tunagrahita saja bisa apalagi orang yang sudah pernah keluar negeri, masa untuk bekerja di sini saja tidak bisa. Faktor dari sosial jelas kurang, dari ekonomi juga kurang, bahkan budaya kurang sekali. Dan kendalanya pun juga banyak. Pertama antara lain memang yang sudah tidak pernah keluar itu menjadi lamban berfikirnya, di sini pendidikan 80% buta huruf. Itu kendalanya. Jadi yang jelas adalah modal. Sumber daya manusia juga rendah, harus tlaten, tapi dari semua faktor tersebut dapat diatasi.” (wawancara dengan Paimin, 25 Mei 2016)

Faktor pendorong Pemerintah Desa memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia Purna yaitu pertama karena bentuk rasa kepedulian bersama, kedua karena banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan mendorong Pemerintah Desa untuk bisa mengubah pola hidup konsumtif, ketiga Pemerintah Desa ingin agar Mereka tidak lagi ke luar negeri tetapi bisa berwirausaha sendiri dan mengubah hidup yang lebih baik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu pertama faktor modal artinya modal disini digunakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan usaha dan pengembangan usaha yang sudah ada, kedua faktor pola pikir masyarakat yang berbeda artinya dalam hidup bermasyarakat terhadap berbagai macam karakter atau sifat manusia, ada yang berfikir untuk maju dan ada pula yang berfikir kolot atau terbelakang. Begitu juga dengan

pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa, ada pula yang menilai hal ini tidak berdampak positif dan menguntungkan.

d) Sarana dan Prasarana Penunjang Program Pemberdayaan

Jadi kalau Kita bicara sarana atau fasilitas, Kita membangun kolam-kolam ikan itu termasuk sarana juga. Yang lele, katakanlah kita membangun kolam-kolam, kemudian yang kedua kita menjembatani kelompok yang kita punyai dengan Pemerintah, bagaimana Kita menjembatani untuk mengakses program bantuan sosial atau hibah dari Pemerintah untuk kegiatan peternakan. Jadi seperti sapi, Kita yang menjembatani, Kita yang mencari program Pemerintah, kemudian sapi turun dan dipelihara oleh kelompok. Kemudian juga bantuan kambing, melalui KUBE dari Kementerian Sosial dan cair diserahkan ke kelompok. Kita juga mencari bantuan tidak hanya ke Pemerintah, ke CSr, ke Bank Indonesia. Dari CSR bank swasta atau bank milik negara BI itu diserahkan ke Pemerintah Desa melalui kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit itu untuk membangun kolam-kolam lele untuk masyarakat.” (wawancara dengan Eko Mulyadi, 24 Mei 2016)

“Kita punya seperti lele, itu Kita melobi. Melobi ke dinas-dinas terkait bagaimana nantinya Pemerintah mendapat stimulasi dana seperti kambing itu juga ada dari teman-teman itu kumpulan satu organisasi sama dengan Pak Lurah, seperti pak Gito itu ikut program sapi. Di Tanggungrejo sendiri juga ada kelompok peternak kambing. Bukan fasilitas dari desa itu semacam dana terus Kita berikan itu bukan, karena desa sendiri juga banyak kekurangan untuk fisik atau kegiatan. Yang jelas semuanya dari hasil melobi. (wawancara dengan Sumaji, 25 Mei 2016)

“Kalau sarana atau fasilitas tidak ada dari Pemerintah Desa. Tapi Pemerintah Desa itu hanya menjembatani saja. Misalnya Pemerintah ada program sosial disampaikan kepada Pemerintah Desa, dan selanjutnya Pemerintah Desa disampaikan ke kelompokkelompok. Pemerintah desa membuatkan proposal untuk diajukan. Ya seperti itu fasilitas dari Pemerintah Desa. Membantu mencari dana. Setelah dana itu cair diserahkan kepada kelompok. Jadi Pemerintah Desa hanya sebagai jembatan dan membuatkan proposal-proposal untuk diajukan.” (wawancara dengan Paimin, 25 Mei 2016)

Sarana dan fasilitas Pemerintah Desa dalam pemberdayaan ini yaitu Pemerintah Desa tidak memberikan modal berupa uang akan tetapi Pemerintah Desa itu sebagai penjemputan untuk mengakses bantuan sosial antara kelompok - kelompok usaha yang telah dibentuk dengan Pemerintah atau Dinas terkait. Seperti halnya Pemerintah Desa melobi atau mengajukan proposal untuk mendapatkan bibit ternak, dan selanjutnya jika bantuan turun diserahkan kepada kelompok. Sedangkan fasilitas yang yang diberikan seperti halnya membangun kolam-kolam ikan lele.

e) Outcome atau hasil dari program pemberdayaan TKI Purna

“Kalau Kita bicara hasil, yang bicara hasil itu adalah materi, itu susah karena dari sekian banyak kegiatan ini memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang berbeda tetapi Kita melihatnya bukan pada hasil itu, tetapi kita melihat dari kemandirian dan perubahan hidup. Kalau dulu Mereka tidak punya usaha sama sekali Mereka sekarang sudah beternak lele, Mereka beternak ayam, sapi, dan beternak kambing. Pencapaian hasil Kita lihat dari ini, bukan dari materi. Kalau materinya beda-beda karena peternak sapi hasilnya beda dengan peternak kambing atau lele.” (wawancara dengan Eko Mulyadi, 24 Mei 2016)

“Ya kelihatannya itu banyak kemajuan, dari taraf hidupnya. Ya tidak semua orang yang habis dari luar negeri Kita bina terus suksesse itu ya tidak, itu hanya omong kosong. Tidak semua orang itu bisa sukses dan berhasil. Karena faktor yang sangat fatal itu biasanya orang dari luar negeri itu cita-citanya Cuma beli motor sam rumah. Nah, itu lah Pemerintah desa mengajak Mereka berwirausaha. Jangan sampai uang hanya untuk membeli rumah atau motor.” (wawancara dengan Sumaji, 25 Mei 2016)

“Ya kalau hasil yang dapat dilihat sampai sekarang yang jelas terjadi perubahan pada masyarakat. Dari segi ekonomi yang jelas sudah ada penambahan dari hasil usaha-usaha yang telah dijalankan. Dan juga Mereka sudah punya usaha sendiri sebagai kerjaan sampingan, disamping pekerjaan tetap Mereka. Jadi yang jelas dapat menambah perekonomian dan dapat membawa perubahan bagi masyarakat Desa Karangpatihan ini. Ya itu hasil yang dapat dilihat sekarang ini”. (wawancara dengan Paimin, 25 Mei 2016)

“Kalau hasil panen itu sudah jelas. Yang kedua dari keluarga Mereka itu sendiri, bila membutuhkan lauk pauk sudah tersedia. Dan juga dari hasil penjualan lele. Juga ada dari anggota itu menambah kolam lele dari hasil penjualan lele. Jadi sekarang juga sudah ada dari anggota itu yang mempunyai lebih dari satu kolam.” (wawancara dengan Sugeng, 24 Mei 2016)

“Ya Alhamdulillah selama 6 bulan ini ikut kelompok, lembunya sudah hamil dan hampir beranak. Kan dari situ sudah kelihatan. Lagi pula sudah saya katakan kalau Kita cuma pelihara satu atau dua ekor saja itu rugi karena banyak nganggurnya.” (wawancara dengan suyitno, 24 Mei 2016)

“Hasilnya sampai sekarang ini yang terlihat masyarakat itu sudah mempunyai usaha ternak kambing khususnya. Dan ternak kambing itu sudah berkembang dan beranak. Dan bahkan sudah ada juga yang menjualnya untuk kebutuhan ekonomi atau untuk pendidikan anaknya. Ya mungkin itu hasil yang terlihat, perekonomian masyarakat bertambah.” (wawancara dengan Teguh, 25 Mei 2016)

Kalau manfaat yang Saya rasakan, pertama kekeluargaan Kita semakin dekat dengan anggota yang lain, kedua membantu perekonomian. contohnya seandainya anak Kita sekolah terus kebingungan uang dalam jumlah yang besar, Kita bisa menjual anakan

dari kambing itu terus dijual. Membantu banget, intinya dalam semua kebutuhan.” (wawancara dengan Mujianto, 25 Mei 2016)

“Kalau manfaatnya yang jelas mendapatkan keuntungan. Kita bisa menikmati keuntungan dari hasil penjualan ikan tersebut. dan juga Kita bisa menambah membuat kolam lagi, dari hasil penjualan ikan.” (wawancara dengan Purwanto, 24 Mei 2016)

Manfaat ya secara otomatis mendapat bantuan sapi ya, otomatis menambah ekonomi, itu sudah jelas. Untuk masa depan, misal mendapat anakan sapi dapat menunjang ekonomi juga yang jelas. Selama ini masih mendapatkan bantuan satu ekor sapi betina.” (wawancara dengan Sugito, 24 Mei 2016)

Hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan ini yaitu yang jelas adanya kemandirian dan perubahan taraf hidup Tenaga Kerja Indonesia Purna. Hal ini terlihat, bahwa Mereka sekarang sudah mempunyai usaha di rumah, sehingga dari usaha tersebut bisa mendapatkan keuntungan untuk menambah perekonomian keluarga.

2. Kelompok TKI Purna

a) Peran Pendamping dan Ketua Kelompok dalam Program Pemberdayaan

“Peranan ketua dalam kelompok yaitu memotivasi teman-teman untuk memelihara bibit ikan, memelihara ikan supaya bisa jadi. Memotivasi seluruh anggota supaya bisa kreatif dan tekun dalam melaksanakan tugas dari kelompok. Mulai dari pembibitan. Dan di awalnya itu pembibitan dari dinas perikanan.” (wawancara dengan Sugeng, 24 Mei 2016)

“Perannya ya untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada kelompok agar lembunya itu begini-begini. Biar ternak ini supaya bisa tambah bagaimana caranya. Akhirnya saya juga mencari tahu ke teman lain, bagaimana supaya lembu saya bisa bertambah dan berkembang.” (wawancara dengan Suyitno, 24 Mei 2016)

“Peranan saya di Kelompok Usaha Bersama, yang pertama saya sebagai pendamping. Jadi Saya mendampingi kelompok-kelompok kecil itu untuk meningkatkan berbagai usaha terutama di bidang ternak kambing ini.” (wawancara dengan Teguh, 25 Mei 2016)

Peranan dari ketua dalam kelompok usaha yaitu memotivasi dan memberi arahan agar anggota kelompok itu bisa lebih semangat dalam memelihara ternaknya dan bisa mengembangkan ternaknya. Sedangkan peran dari pendamping itu sendiri, yaitu selalu mendampingi dan memantau kelompok - kelompok usaha agar kelompok tersebut bisa maju.

b) Kendala Kelompok dalam Program Pemberdayaan

“Dalam kelompok itu masalahnya pemasaran belum begitu lancar, dan juga dalam hal melestarikan bibit. Contohnya karena bibit ikan itu kecil, dari kebutuhan bibit sering sering banyak yang mati. Ya kalau masalah dari anggota kelompok sendiri sampai saat ini belum ada. Ya Cuma dari pertumbuhan ikan itu, mungkin ada masukan dari anggota itu ada yang mati bibitnya sekian-sekian begitu. Kalau selama ini untuk pemasarannya Pemerintah Desa membantu sekali. Misalnya kalau ada yang membutuhkan ikan lele, biasanya dari Pemerintah Desa itu menyarankan untuk mengambil di kelompok-kelompok. Jadi pembeli itu diarahkan dan di kasih tahu untuk membeli disini.” (wawancara dengan Sugeng, 24 Mei 2016)

“Masalah yang dihadapi selama ini ya cuma kadang kalau pas musim kemarau kesulitan cari pakan. Kita untuk pakannya kan mengandalkan rumput, jadinya Kita sulit mendapatkan rumput kalau musim kemarau. Terus kalau kemarau otomatis rumputnya berkurang. Jadi untuk mengatasi itu Kita harus keluarkan modal untuk membeli pakan dari luar. Mungkin begitu.” (wawancara dengan Suyitno, 24 Mei 2016)

“Kalau permasalahan yang pertama banyak kegiatan dari anggota itu loyalnya kurang. Jadi kadang itu ada yang semangat ada juga yang tidak. Tapi itu hal yang wajar saja. Cara mengatasinya ya sering-sering Kita kasih pemahaman, bimbingan, dan memberi tahu manfaatnya ternak kambing ini. Karena juga ada pertemuan, lha disitu tempat Kita menyampaikan berbagai permasalahan dan mengatasi masalah tersebut.” (wawancara dengan Teguh, 25 Mei 2016)

Kendalanya itu kalau ada penyakit, ternak tiba-tiba mati, kita itu sebagai anggota bingung karena kurang ilmu. Misalnya juga kambingnya sakit itu Kita bingung cara mengobatinya. Upaya Pemerintah Desa selama ini sudah menyarankan kalau ada kambing mati, Kita sudah disiapkan no.HP mantri hewan. Sudah ada kerjasamanya, jadi misal ada yang mati atau sakit Kita disuruh menghubungi mantri tersebut. Dan juga jika Kita tidak punya biaya Kita bisa pinjam atau minta bantuan pada kelompok Kita.” (wawancara dengan Mujianto, 25 Mei 2016)

“Kalau kendala ini pembelinya. Kadang pembelinya itu lambat jadi pakannya kita tambah lagi. Jadi sekiranya hari ini misal harus panen, Kita masih menunggu sampai seminggu lagi, Kita otomatis tambah pakan.” (wawancara dengan Purwanto, 24 Mei 2016)

“Kalau kendala selama ini sebagai anggota tidak ada masalah. Artinya sampai saat ini sapi-sapi juga masih dipelihara dengan baik. Jadikan tidak ada masalah, pakan juga masih ada.” (wawancara dengan Sugito, 24 Mei 2016)

Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok usaha yaitu diantaranya masalah pemasaran yang kurang luas dan sering adanya keterlambatan panen karena tidak adanya pembeli. Selain itu juga kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para peternak semisal

ada ternak yang sakit atau mati. Dan kurangnya loyalitas anggota pada setiap kali ada perkumpulan. Sehingga dengan adanya pertemuan, disitulah tempatnya memberikan pemahaman, pengarahan, dan bimbingan bagi para anggota kelompok usaha agar bagaimana usaha yang telah berjalan itu dapat berkembang. Dari berbagai masalah tersebut, semuanya dapat teratasi. Misalnya membantu promosi hasil usaha ke masyarakat luas dan menyediakan mantri hewan bagi ternak yang sakit.

c) Harapan yang diinginkan kelompok

“Harapan Kami disini, kelompok kita itu bisa berkembang bagus. Usaha lele juga bisa menjadi tambahan ekonomi, sehingga bisa menambah perekonomian dari anggota kelompok usaha.” (wawancara dengan Sugeng, 24 Mei 2016)

“Harapannya ya kalau bisa jangan cuma itu, supaya ya kalau Cuma satu atau dua itukan kayaknya kurang. Kalau seperti ada empat atau lima itu otomatis bener-bener kreatif. Kalau cuma dua itu banyak nganggurnya. Serasa seperti sampingan, karena paling Cuma pagi siang sore dikandang, lainnya nganggur.” (wawancara dengan Suyitno, 24 Mei 2016)

“Harapannya masyarakat itu bisa mandiri, punya pendapatan ekonomi yang lebih dan juga penghasilannya. Mereka tidak selalu mengharapkan bantuan yang datang saja. Intinya supaya masyarakat di Desa Karangpatihan itu bisa maju dan mandiri” (wawancara dengan Teguh, 25 Mei 2016)

“Harapannya pengembangan ternak kambing ini tetap berjalan, ada peningkatan, dan tindak lanjut lagi dari pemerintah.” (wawancara dengan Mujianto, 25 Mei 2016)

“Ada lagi program dari Pemerintah, termasuk kemarin seperti program lele dan ada program dari pemerintah lain seperti kambing atau sapi.” (wawancara dengan Purwanto, 24 Mei 2016)

“Harapan kedepan kalau bisa ada bantuan-bantuan lagi. Ya mungkin seandainya bukan untuk kelompok saya, bisa ke kelompok lain, atau bantuan lainnya. Harapannya itu.” (wawancara dengan Sugito, 24 Mei 2016)

Harapan dari kelompok-kelompok usaha ini yaitu usaha yang telah ada ini dapat berkembang lagi sehingga Tenaga Kerja Indonesia Purna bisa hidup mandiri tidak bergantung pada bantuan. Dan diharapkan ada lagi program bantuan seperti ini dengan jenis usaha yang berbeda.

Analisa Data

Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan yaitu sebagai inovator artinya Pemerintah Desa yang mempunyai pemikiran atau ide untuk memberdayakan Tenaga kerja Indonesia Purna, sebagai motivator artinya yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk berwirausaha, dan sebagai actuating artinya Pemerintah Desa yang memberikan saran dan arahan agar dapat berwirausaha di Desa. Demi mewujudkan program pemberdayaan tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu: 1). mengadakan sosialisai dan motivasi dengan mengumpulkan Tenaga Kerja Indonesia Purna yang ada di Desa Karangpatihan, supaya mereka yang sudah kembali ke kampung halaman, bisa produktif di desanya, 2). Memberikan pelatihan dan pembinaan dalam berwirausaha, kemudian dibentuk kelompok-kelompok usaha berdasarkan bakat, minat, dan ketrampilan yang dimiliki, setelah mereka punya usaha mandiri di rumah, Pemerintah Desa hanya melakukan pendampingan.

Ada sekitar 250 Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan yang ikut sosialisasi pemberdayaan ini. Bentuk kelompok usaha yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa yaitu kelompok usaha bersama, di bidang peternakan kambing, bidang peternakan sapi, dan bidang peternakan ikan lele. Kelompok usaha peternakan ini telah terstruktur organisasi dan berkembang dengan baik. Kelompok ini mendapat modal usaha dari dinas terkait. Dalam kelompok usaha tersebut ada kurang lebih sekitar 160 Tenaga Kerja Indonesia Purna yang sudah mempunyai usaha sendiri.

Faktor yang mendorong terbentuknya kelompok usaha pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna yaitu karena bentuk rasa kepedulian Pemerintah Desa kepada Tenaga Kerja Indonesia Purna dan ingin mengubah pola hidup konsumtif Tenaga Kerja Indonesia Purna, dengan harapan Mereka dapat berwirausaha dan produktif di Desa sendiri. Pemberdayaan ini mendapatkan bantuan dari dinas-dinas terkait dan para dermawan sebagai modal awal berwirausaha. Dalam hal ini, Pemerintah Desa berperan sebagai penjemabatan antara kelompok usaha dengan penyalur bantuan. Pemerintah Desa hanya mencarikan modal atau bantuan, dan selanjutnya diserahkan dan dikembangkan oleh kelompok. Disamping itu Pemerintah Desa juga membantu membangun sarana untuk berwirausaha, misalnya dengan membangun kolam-kolam ikan. Peran Pemerintah Desa tidak cukup sampai pada pelatihan dan membantu mencari modal, setelah pemberdayaan ini berjalan dan usaha telah berkembang Pemerintah Desa selalu

melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok usaha sampai pada pemasarannya. Artinya Pemerintah Desa juga membantu Tenaga Kerja Indonesia Purna dalam mempromosikan dan memasarkan hasil usahanya kepada masyarakat luas. Hingga sampai saat ini, hal yang menjadi penghambat Pemerintah Desa dalam mengembangkan usaha yang ada yaitu masalah modal. Modal disini digunakan Pemerintah Desa untuk melakukan pelatihan dan pembinaan kepada Tenaga Kerja Indonesia Purna. Dengan rutinya pelatihan yang diberikan, maka usaha yang telah ada dapat berkembang dan para pengusaha dapat menjalankan usahanya sendiri tanpa ada lagi pendampingan terus menerus.

Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan telah berhasil dijalankan terbukti Mereka sudah mempunyai usaha mandiri di rumah. Tidak hanya peran dari Pemerintah Desa, tetapi peran dari ketua atau pendamping kelompok usaha juga berpengaruh terhadap berkembangannya usaha Mereka. Dapat dilihat bahwa peran Mereka dalam pemberdayaan ini yaitu dimana Mereka selalu mendampingi, memberi arahan dan memotivasi kepada anggota kelompok agar dapat mengembangkan usahanya. Dengan berjalannya usaha tersebut tentu ada berbagai masalah yang dihadapi dalam setiap kelompok yaitu pemasaran hasil usaha yang kurang luas, loyalitas anggota yang kurang, dan juga kurangnya ilmu pengetahuan anggota tentang tata cara beternak. Tetapi masalah tersebut dapat teratasi karena adanya upaya dari Pemerintah Desa sehingga usaha tetap berjalan. Upaya yang telah Pemerintah Desa lakukan untuk mengatasi masalah dalam kelompok ini di antaranya yaitu selalu memberikan masukan dan saran di saat kelompok usaha tersebut ada kegiatan rutin dan menyediakan mantra hewan khususnya bagi peternak kambing sehingga jika ada ternak yang sakit bisa langsung menghubungi matri hewan yang telah ditunjuk oleh desa. Bergabung dalam kelompok usaha pemberdayaan ini tentunya Tenaga Kerja Indonesia Purna sudah mendapatkan hasilnya. Hasil yang telah dicapai tentunya yaitu keuntungan. Dengan usaha yang telah dimiliki Mereka sudah dapat mengembangkan usahanya, selanjutnya hasilnya Mereka jual sebagai keuntungan Mereka selalu berusaha sehingga dapat menambah perekonomian keluarga. Dengan adanya usaha yang dimiliki ini dapat menumbuhkan sikap kemandirian anggota sehingga Mereka tidak selalu mengandalkan bantuan saja. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang telah diberdayakan ini berharap usaha yang telah dimiliki ini dapat berkembang dan bisa membentuk kelompok usaha lagi dengan jenis usaha yang lain.

Kesimpulan

Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai inisiator untuk memperdulikan Tenaga Kerja Indonesia Purna, sebagai motivator agar Tenaga Kerja Indonesia Purna bisa hidup mandiri berwirausaha di desa, dan actuating sebagai penggerak dan pemberi arahan. Upaya yang telah Pemerintah Desa lakukan dalam hal ini yaitu, melakukan pendekatan kepada Tenaga Kerja Indonesia Purna, mengumpulkan dan membentuk kelompok usaha sesuai bakat yang dimiliki, mengadakan pembinaan dan pelatihan usaha, melakukan pendampingan berkelanjutan dan membantu pemasaran. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang diberdayakan pada tahun 2014 ada sejumlah kurang lebih 250 orang. Kelompok usaha yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik dan berkembang yaitu kelompok usaha peternak kambing, peternak ikan lele, dan peternak sapi. Dalam kelompok tersebut ada sekitar 160 Tenaga Kerja Indonesia Purna yang sudah punya usaha sendiri. Dalam kelompok ini, para Tenaga Kerja Indonesia Purna mendapat modal bibit ternak dari bantuan dinas-dinas terkait. Pemerintah Desa dalam hal ini sebagai pen jembatan antara kelompok usaha dan Pemerinatah sebagai penyalur bantuan. Faktor yang mendorong Pemerintah Desa memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia Purna yaitu karena bentuk rasa kepedulian bersama, ingin mengubah sifat konsumtif masyarakat untuk bisa berwirausaha dan kurangnya faktor ekonomi dan sosial. Sedangkan faktor penghambat dalam pemberdayaan ini yaitu faktor modal untuk pengembangan usaha dan adanya perbedaan pola piker masyarakat. Akan tetapi hal tersebut dapat teratasi.

Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan ini sangat berhasil. Pemerintah Desa sangat berperan sekali dalam program ini dan juga adanya kerjasama yang baik dengan kelompok-kelompok usaha yang telah dibentuk. Sehingga dapat dilihat hasilnya yaitu adanya perubahan hidup dan kemandirian masyarakat, dan meningkatnya taraf hidup perekonomian dengan usaha yang dimiliki.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai almamater kami tercinta.

Daftar Pustaka

- Arya Hadi Dharmawan. (2006). *Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa : Investigasi Teoretik dan Empirik*. (Arya Hadi Dharmawan, Ed.). Bogor: Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB Bekerjasama dengan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia-UNDP. Retrieved from <http://psp3.ipb.ac.id/web/>
- Azam Awang. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10, 42–46.
- Ellya Rosana. (2011). Modernisasi Dan Perubahan Sosial. *Tapis*, 7(12), 31–47. Retrieved from <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1529/1269>
- Hamidah, C. (2016). Peran keluarga tenaga kerja indonesia di ponorogo dalam menentukan pengeluaran konsumsi dan investasi. *Ekulibrium*, 11(1), 18–28. Retrieved from <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekulibrium/article/view/109/97>
- Juliansyah Noor. (2011) *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, (2010), *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rauf Hatu. (2011). PERUBAHAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT PEDESAAN (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik) Rauf. *Inovasi*, 8(4), 1–11. Retrieved from <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/721/664>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatis dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taliziduhu Ndhara. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wafirotn, K. Z. (2013). Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Ekulibrium*, 11(2), 15–33. Retrieved from <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekulibrium/article/view/36/33>